

# PERAN STRATEGIS ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN SISWA KURANG MAMPU DI SMKN 3 BANJARMASIN

Siti Raisyah<sup>1</sup>; Putri Medina Heru Arnafama<sup>2</sup>; Tri Ananda Setiyani<sup>3</sup>;  
Aslamiah<sup>4</sup>; Celia Cinantya<sup>5</sup>

Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat  
Jln. Brigjend H. Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
E-mail : [st.raisyah.iphone@gmail.com](mailto:st.raisyah.iphone@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to examine the strategic role of educational administration in improving access to education for students from low-income backgrounds at SMKN 3 Banjarmasin. This study uses a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that educational administration plays a major role in designing and implementing educational assistance policies, such as scholarships, payment flexibility, and the 'Saudara Asuh' program. This program has proven effective in reducing students' economic burden and increasing their participation and enthusiasm for learning. This study also emphasizes the importance of empathy-based and participatory policies in inclusive education management.

**Keywords:** *Educational Administration, Access To Education, Education Policy, Economics, Inclusive Schools*

Pendidikan adalah hak fundamental setiap individu dan merupakan faktor kunci dalam pembangunan manusia dan sosial ekonomi bangsa. Namun, hambatan ekonomi kerap menjadi penghalang utama bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan, ketimpangan masih terlihat, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

SMKN 3 Banjarmasin sebagai salah satu institusi kejuruan unggulan di Kalimantan Selatan menghadapi tantangan serupa. Banyak siswa yang potensial secara akademik namun terkendala secara ekonomi. Administrasi pendidikan di sekolah ini tidak hanya berperan dalam pengelolaan operasional, tetapi juga sebagai agen perubahan yang merancang solusi konkret melalui kebijakan afirmatif.

Akses pendidikan menjadi salah satu isu yang tidak hanya terkait dengan aspek akademik, tetapi juga dengan keberlanjutan dan kesetaraan dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh

setiap individu, tanpa terkecuali (Nurlailiya & Khasna, 2024). Namun, dalam kenyataannya, akses terhadap pendidikan seringkali terhalang oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Ketidakmampuan finansial tidak hanya membatasi kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda.

Faktor ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Di Indonesia, meskipun kebijakan pendidikan sudah banyak mengalami perbaikan, termasuk peluncuran program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), kesenjangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan masih tetap menjadi tantangan besar. Salah satu indikatornya dapat dilihat pada disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta, yang seringkali dipengaruhi oleh daya beli masyarakat (Mawaddah, 2023).

SMKN 3 Banjarmasin memiliki reputasi yang baik dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja di berbagai bidang, tidak sedikit siswa yang terhambat dalam mengikuti pendidikan karena keterbatasan biaya. Dalam konteks ini, administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Nasir *et al.*, (2023) menyatakan administrasi pendidikan bukan hanya sekadar tugas administratif dalam pengelolaan sekolah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk merancang kebijakan dan program yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi siswa, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Peran administrasi pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan tidak hanya terbatas pada pengelolaan anggaran, tetapi juga mencakup aspek perencanaan kebijakan yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan, memberikan dukungan bagi siswa yang kurang mampu, serta menciptakan peluang bagi mereka untuk mengakses pendidikan secara adil dan merata (Kurniawan, 2023). Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ini, peran administrasi pendidikan dalam menyusun program-program pendidikan yang berbasis pada prinsip keadilan dan pemerataan juga perlu diperhatikan. Program seperti pemberian bantuan biaya pendidikan, pelatihan keterampilan, atau beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses pendidikan di SMKN 3 Banjarmasin.

Pada tingkatan besar, masalah pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi sering kali berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah (Rohmi *et al.*, 2023). Akses yang terbatas terhadap pendidikan akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi, keterampilan, dan produktivitas masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis yang harus diambil untuk

memastikan terjadinya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Secara khusus, administrasi pendidikan yang efektif dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas akses pendidikan di tingkat sekolah. Administrasi pendidikan bukan hanya bertugas untuk mengelola data siswa, anggaran, atau fasilitas sekolah, tetapi juga merancang kebijakan yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dalam konteks ini, kebijakan berbasis pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi siswa menjadi sangat penting (Mesiono *et al.*, 2024). Sebagai contoh, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk bantuan pendidikan, pemerintah atau sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap mengikuti pendidikan tanpa adanya hambatan finansial.

Sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Warni *et al.*, (2021) pengaruh kepemimpinan menentukan bagaimana suatu pekerjaan terlaksana dalam suatu organisasi, dimana gaya kepemimpinan transformasional tidak hanya memperhatikan kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan tetapi juga menumbuhkan kesadaran bagi pemimpin untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap faktor manusia, kinerja, serta pertumbuhan organisasi, sehingga terjalin kerjasama yang humanis antar warga sekolah.

Selain itu, keterlibatan komunitas dan kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat juga sangat penting. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat dapat memperluas akses pendidikan melalui program-program yang melibatkan masyarakat lokal, misalnya melalui yayasan pendidikan atau dana pendidikan dari sektor swasta. Program-program semacam ini telah terbukti efektif di beberapa daerah dalam meningkatkan partisipasi siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin.

Kendala utama yang dihadapi pada SMKN 3 Banjarmasin terkait dengan akses

pendidikan adalah kesenjangan ekonomi. Meskipun banyak siswa yang memiliki potensi besar, keterbatasan biaya sering kali menjadi penghalang utama. Administrasi pendidikan yang ada di SMKN 3 Banjarmasin perlu lebih memperhatikan kondisi ini dengan lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan kebijakan bantuan pendidikan yang tepat sasaran, atau mungkin dengan menggandeng berbagai pihak untuk mendanai pendidikan siswa yang membutuhkan.

Selain masalah biaya, keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga sering menjadi tantangan di sekolah-sekolah kejuruan. SMKN 3 Banjarmasin perlu meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan teknis mereka. Dalam hal ini, administrasi pendidikan perlu memainkan peran dalam merencanakan alokasi anggaran yang lebih efisien serta menciptakan sistem yang dapat mendorong partisipasi lebih banyak pihak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dengan memahami lebih lanjut tentang bagaimana administrasi pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan, khususnya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi sebagai faktor penentu, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi SMKN 3 Banjarmasin, tetapi juga dapat dijadikan acuan bagi sekolah-sekolah lainnya yang menghadapi masalah serupa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam peran administrasi pendidikan dalam konteks akses pendidikan. Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah, staf administrasi, guru, siswa, dan orang tua. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung aktivitas sekolah, dan studi dokumentasi kebijakan serta program bantuan.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang ada, serta menganalisis hubungan antara kebijakan administrasi pendidikan dan peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung variabel-variabel tertentu, melainkan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan menggali persepsi dan pengalaman para informan mengenai kebijakan dan implementasi administrasi pendidikan yang ada di SMKN 3 Banjarmasin serta dampaknya terhadap akses pendidikan siswa.

## HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMKN 3 Banjarmasin memiliki beberapa kebijakan afirmatif dalam meningkatkan akses pendidikan. Salah satunya adalah program '*Saudara Asuh*', di mana dana bantuan dikumpulkan dari civitas sekolah secara sukarela dan dialokasikan untuk siswa kurang mampu. Bentuk bantuan mencakup pengadaan sepeda bagi siswa yang kesulitan transportasi, serta kelonggaran pembayaran biaya pendidikan secara cicilan.

Selain itu, beasiswa internal dan bantuan alat tulis juga diberikan kepada siswa dari keluarga miskin. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomi siswa, serta dilakukan secara transparan melalui asesmen administrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan pemerataan akses dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar.

## PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan administrasi pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sangat

mempengaruhi efektivitas program bantuan. Dengan pengelolaan dana yang efisien dan kolaborasi antar pihak, hambatan ekonomi yang dihadapi siswa dapat dikurangi secara signifikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi kepada orang tua masih perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan komunitas yang lebih luas.

Administrasi pendidikan memainkan peran penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya agar program pendidikan dapat berjalan dengan efektif, termasuk di SMKN 3 Banjarmasin. Salah satu inisiatif yang dapat diambil adalah program *saudara asuh* yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan bantuan finansial, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada siswa agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Rohmatillah (2023) menyatakan administrasi pendidikan bertugas untuk memastikan bahwa program ini dikelola dengan transparan dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, keberhasilan program ini juga bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memberikan dukungan.

Salah satu strategi penting dalam administrasi pendidikan adalah melakukan pemetaan kebutuhan siswa kurang mampu untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Administrasi di SMKN 3 Banjarmasin harus memiliki data yang akurat mengenai kondisi ekonomi dan sosial siswa untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan bantuan. Dengan data yang tepat, program *saudara asuh* dapat dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan pihak luar, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, sangat penting untuk menunjang kesuksesan program ini. Ayu *et al.*, (2024) menyatakan keterlibatan berbagai pihak akan

membantu dalam menyediakan sumber daya tambahan dan memperluas jaringan dukungan bagi siswa.

Selain pengelolaan sumber daya dan pemetaan kebutuhan, peran administrasi pendidikan juga mencakup evaluasi dan monitoring program *saudara asuh*. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk menilai efektivitas program ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Septiyani & Rumefi (2023) menyatakan administrasi pendidikan harus mampu menyusun laporan yang komprehensif dan transparan mengenai perkembangan program, termasuk dampaknya terhadap akses pendidikan siswa kurang mampu. Dengan adanya evaluasi yang terus-menerus, sekolah dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan agar program tetap relevan dan efektif. Selain itu, dokumentasi yang baik juga dapat menjadi alat advokasi untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari stakeholder lainnya.

Partisipasi aktif dari guru dan tenaga kependidikan juga sangat penting dalam implementasi program *saudara asuh*. Guru dapat berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan akademik dan motivasi kepada siswa yang dibantu. Administrasi pendidikan harus memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru untuk mendukung peran ini. Dukungan moral dan motivasi dari guru dapat membantu siswa untuk lebih percaya diri dan bersemangat dalam mengejar cita-cita mereka (Harahap *et al.*, 2023). Selain itu, interaksi yang positif antara guru dan siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung.

Keberhasilan program *saudara asuh* di SMKN 3 Banjarmasin sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Administrasi pendidikan harus memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka antara sekolah, siswa, orang tua, dan para pendukung program. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak dapat saling berbagi

informasi dan solusi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dapat membantu memperkuat dukungan terhadap program ini. Dengan demikian, peran strategis administrasi pendidikan tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan bantuan pendidikan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia pada SMKN 3 Banjarmasin seperti banyak sekolah lainnya. Sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan cukup dana untuk mendukung semua program pendidikan, terutama untuk siswa dari keluarga miskin.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga, seperti pemerintah daerah, lembaga donor, atau perusahaan swasta yang memiliki program *corporate social responsibility* (CSR) untuk pendidikan (Iqbal, 2021). Dengan menggandeng pihak-pihak tersebut, sekolah dapat memperoleh dana tambahan yang akan digunakan untuk mendukung program beasiswa, subsidi biaya, dan bantuan pendidikan lainnya

Komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan masyarakat juga sangat penting dalam mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan finansial. Melalui pendekatan ini, administrasi pendidikan dapat memperoleh data yang akurat mengenai siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Astawa (2017) menyatakan sekolah juga dapat melakukan sosialisasi program bantuan kepada masyarakat dan orang tua siswa, sehingga mereka lebih sadar akan peluang yang ada untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Proses ini membantu mencegah ketimpangan dalam distribusi bantuan dan memastikan bahwa tidak ada siswa yang terlewatkan dari program yang ada.

Nashar *et al.*, (2025) menyatakan bahwa

orang tua dan masyarakat berperan aktif dalam proses pemberian masukan Dan kebutuhan Pendidikan di sekolah baik secara akademik maupun non akademik, memberikan bantuan secara ikhlas dengan kemampuan yang dipunya.

## SIMPULAN

Administrasi pendidikan di SMKN 3 Banjarmasin berperan penting dalam membentuk kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi siswa. Kebijakan seperti beasiswa, kelonggaran pembayaran, dan program solidaritas sosial terbukti mampu meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan. Perluasan program ini dan penguatan kerja sama lintas sektor sangat disarankan agar keberlanjutan dan efektivitas dapat terus ditingkatkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana tentang peran administratif dalam pendidikan inklusif dan dapat dijadikan rujukan untuk replikasi di sekolah lain dengan tantangan serupa, serta untuk memahami sejauh mana peran administrasi pendidikan di SMKN 3 Banjarmasin dalam mengurangi kendala ekonomi dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal penjaminan mutu*, 3(2), 197-205
- Ayu, M., Neviyarni, S., & Zen, Z. (2024). Peran Komunitas Sekolah Dalam Mengatasi Ketidakesetaraan Pendidikan Di Tingkat Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 376-387.
- Harahap, A. C. P., Addilla, A., Butar, N. F. B., Siregar, L. R., Miranda, I. L., Tanjung, D. A., & Nitami, S. D. (2023). Studi kasus siswa yang kehilangan motivasi diri terhadap karir dan pekerjaan di masa depan di smas budi satria. *Widya Balina*, 8(1), 604-611.

- Iqbal, A. (2021). Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 22-36.
- Kurniawan, M. A. (2023). BAB 5 Manajemen keuangan pendidikan: Mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, dan Implementasi Praktis*, 123.
- Mawaddah, N. (2023). *Efisiensi Teknis Pendidikan Menengah pada Daerah Pemekaran di Kawasan Timur Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).
- Mesiono, M., Wasiyem, W., Zakiyah, N., Fahrezi, M., Nursakinah, I., & Azhari, M. T. (2024). Dinamika kepemimpinan perguruan tinggi: Tantangan dan strategi manajemen untuk menanggapi perubahan cepat di era globalisasi. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3146-3153.
- Nashar, A. F., Nabila, A., AS, K. L. F., Mahmudah, R. A., Suriansyah, A., & Aslamiah, A. (2025). Peran Orang Tua Dan Masyarakat Dalam Mendukung Pendidikan Bermutu Pada Sdn Benua Anyar 4 Banjarmasin. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 6191-6198.
- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya peningkatan manajemen pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2).
- Nurlailiya, I., & Khasna, S. (2024). Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi: Studi tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas di Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 175-200.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 12(1).
- Rohmi, M. L., Pratiwi, D., & Ramadhani, A. A. (2023). Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi & Bisnis*, 22(2), 166-177.
- Septiyani, M., & Rumefi, U. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil). *Transparan*, 16(2), 48-60
- Warni, R. E., Aslamiah & Rizalie, A. M. (2021). Relationship of Transformational Leadership, Work Culture and Job Satisfaction with Teacher Performance. *Journal of K6 Education and Management*, 4(2), 122-128